



**PEMERINTAH
PROVINSI GORONTALO**

PANDUAN PENGUKURAN INDEKS KUALITAS PERENCANAAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024

BAPPEDA PROVINSI GORONTALO



PANDUAN PENGUKURAN INDEKS KUALITAS PERENCANAAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024

A. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Perencanaan Pembangunan Nasional yang dirancang menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Tahunan. Tahapan dari perencanaan pembangunan nasional yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana.

Provinsi Gorontalo merupakan provinsi ke 32 di Indonesia, yang resmi berdiri tanggal 16 Pebruari 2001 berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo, dalam menjalan pembangunan daerah berpedoman pada perencanaan pembangunan nasional. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, Provinsi Gorontalo menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2009. RPJPD dimaksudkan memberikan arahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun rencana tahunan sekaligus menjadi acuan makro bagi seluruh pemangku kepentingan daerah, yaitu: Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, masyarakat dan dunia usaha dalam menjalankan perannya sebagai aktor pembangunan di daerah, dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan



pembangunan dan pelayanan publik, serta partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM ini juga nantinya menjadi rujukan utama dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berjangka waktu satu tahun dan juga bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD). Beberapa hal inilah yang kemudian menjadikan RPJM Daerah menjadi satu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

Dalam rangka memperkuat dan mempertajam keselarasan serta kesesuaian rencana pembangunan nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) telah menyusun pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN). Instrumen ini digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Komponen utama dari penilaian IPPN ini dengan melihat keselarasan antara perencanaan yang disusun oleh K/L/D sehingga sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.

Sebagai tindak lanjut dari instrumen yang dikeluarkan oleh Kementerian PPN/Bappenas maka pemerintah Provinsi Gorontalo mengembangkan instrumen dimaksud dengan melakukan beberapa penyesuaian dengan kondisi daerah. Selain itu terdapat pula beberapa indikator tambahan yang melengkapi indikator utama yang nantinya



menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan rekomendasi peningkatan kualitas perencanaan daerah.

B. Tujuan

Tujuan dari pengukuran indeks kualitas perencanaan daerah adalah:

- 1) untuk mengukur secara kuantitatif kualitas perencanaan daerah pada kabupaten/kota dalam lingkup Provinsi Gorontalo.
- 2) Menjadi acuan dalam menyusun perencanaan daerah pada tahun selanjutnya.

C. Kerangka Instrumen Indeks Kualitas Perencanaan

Indeks Kualitas Perencanaan Daerah menggunakan instrumen pengukuran yang mengacu pada Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 3 tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.

• Aspek, Indikator dan Subindikator

Penilaian kualitas perencanaan didasarkan pada instrument penilaian yang terdiri dari aspek, indicator dan subindikator. Instrumen secara garis besarnya terdiri dari tiga aspek, yaitu: sinergi, kualitas perencanaan dan Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja. Setiap aspek instrument dibagi menjadi terdiri beberapa indicator dan setiap indicator terdapat subindikator dan selanjutnya pada setiap subindikator memiliki beberapa pertanyaan.

1. *Sinergi* adalah aspek yang digunakan untuk mengukur kerja sama antar unit pemerintaharr, yaitu pemerintah dan daerah untuk saling mengisi dan melengkapi dalam upaya bersama membangun sebuah rencana agar pelaksanaan pelayanan dasar agar dapat mewujudkan tujuan Bersama. Komponen penilaian dari sinergi terdiri dari 3 indikator yaitu:

- 1) Keselarasan dokumen RPJMD kabupaten/kota dengan dokumen RPJMD Provinsi dan RPJMN. Indikator ini digunakan untuk mengukur



kesesuaian substansi dalam dokumen RPJMD kabupaten/kota dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN, meliputi 6 subindikator: 20

- a) Keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD kabupaten/kota dengan sasaran dalam RPJMD provinsi dan prioritas nasional RPJMN. Subindikator ini terdiri dari 4 item pertanyaan.
 - b) Tersedianya dukungan program kabupaten/kota dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam RPJMD Provinsi dan RPJMN. Subindikator ini dimaksudkan. Subindikator ini terdiri dari 7 item pertanyaan.
 - c) Indikator makro pada RPJMD kabupaten/kota selaras dengan indicator makro pada RPJMD provinsi dan RPJMN. Subindikator ini terdiri dari 6 pertanyaan.
 - d) Dokumen RPJMD kabupaten/kota selaras dengan Proyek Prioritas Strategis dalam RPJMD provinsi dan RPJMN. Subindikator ini terdiri dari 1 pertanyaan.
 - e) Komponen SPM di RPJMD kabupaten/kota selaras dengan komponen SPM Provinsi dan Nasional. Subindikator ini terdiri dari 1 pertanyaan.
 - f) Target SPM kabupaten/kota selaras dengan target SPM provinsi dan nasional. Subindikator ini terdiri dari 1 pertanyaan.
- 2) Keselarasan dokumen RKPD dengan RKP. Pengukuran kesesuaian substansi dalam dokumen RKPD kabupaten/kota dengan dokumen RKPD provinsi dan dokumen RKP. Indikator ini terdiri dari 8 subindikator, yaitu:
- a) Keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan kabupaten/kota dalam RKPD dengan sasaran prioritas dalam RKPD provinsi dan RKP. Subindikator ini terdiri dari 4 item pertanyaan.
 - b) Tersedianya dukungan program daerah RKPD kabupaten/kota terhadap Prioritas Nasional 1 RKP, yaitu: penguatan ekonomi dan pertumbuhan berkualitas. Subindikator ini terdiri dari 2 item pertanyaan



- c) Tersedianya dukungan program daerah RKPD kabupaten/kota terhadap kegiatan Prioritas Nasional 2 RKP, yaitu: Pengembangan dan Pemerataan Wilayah. Subindikator ini terdiri dari 2 item pertanyaan.
 - d) Tersedianya dukungan program daerah RKPD kabupaten/kota terhadap kegiatan prioritas nasional 3 RKP, yaitu: peningkatan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing. Subindikator ini terdiri dari 2 item pertanyaan
 - e) Tersedianya dukungan program daerah RKPD kabupaten/kota terhadap kegiatan prioritas prioritas 4 RKP yaitu: revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Subindikator ini terdiri dari 2 item pertanyaan.
 - f) Tersedianya dukungan program daerah RKPD kabupaten/kota terhadap kegiatan prioritas prioritas 5 RKP, yaitu penguatan infrastruktur dan pelayanan dasar. Subindikator ini terdiri dari 2 item pertanyaan.
 - g) Tersedianya dukungan program daerah RKPD kabupaten/kota terhadap kegiatan prioritas prioritas 6 RKP, yaitu: Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim. Subindikator ini terdiri dari 2 item pertanyaan
 - h) Indikator makro pada RKPD kabupaten/kota selaras dengan indikator makro pada RPJMD provinsi dan RKP. Subindikator ini terdiri dari 6 item pertanyaan.
- 3) Kesesuaian anggaran daerah (APBD) untuk membiayai program prioritas nasional/major project dalam dokumen RKPD kabupaten/kota. Indikator ini terdiri dari 1 subindikator dan 1 item pertanyaan.
2. *Kualitas Perencanaan* adalah Aspek yang mengukur kualitas perencanaan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara isu strategis target - Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD atau RKPD, dan tingkat inovasi dalam perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah. Komponen penilaian dari aspek Kualitas Perencanaan terdiri 2 indikator, yaitu:



- 1) Kesesuaian antara isu strategis-target-program/ kegiatan/ proyek pada RPJMD atau RKPD kabupaten/kota. Indikator ini terdiri dari 3 subindikator.
 - a. Kesesuaian isu strategis dengan kebutuhan daerah. Subindikator terdiri 3 item pertanyaan.
 - b. Kesesuaian target dan sasaran pembangunan dalam menyelesaikan isu dan prioritas daerah. Subindikator ini terdiri dari 2 item pertanyaan.
 - c. Kesesuaian program/ kegiatan/ proyek dalam mencapai target dan sasaran program. Subindikator ini terdiri dari 2 item pertanyaan.
- 2) Inovasi perencanaan pembangunan. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat inovasi yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam proses perencanaan pembangunan. Indikator ini terdiri dari 3 subindikator.
 - a) Keterkaitan permasalahan dengan inovasi yang dilaksanakan. Subindikator ini terdiri 1 item pertanyaan.
 - b) Keterkaitan output dengan outcome inovasi. Subindikator ini terdiri dari 1 item pertanyaan.
 - c) Proporsi jumlah proyek inovasi di dalam perencanaan pembangunan daerah terhadap perencanaan proyek regular. Subindikator ini terdiri 1 item pertanyaan.
3. Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja adalah aspek yang digunakan untuk mengukur keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja dilihat dari target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran kinerja Lembaga terkait. Aspek ini diukur dari *cascading* target pembangunan daerah kabupaten/kota menjadi target kinerja lembaga terkait di dalam pemerintah daerah. Pengukuran indicator ini diperoleh dari 2 item pertanyaan.



- **Bobot, Opsi dan Skor Penilaian**

Bobot instrument adalah nilai atau tingkat kepentingan yang diberikan kepada setiap aspek, indicator dan subindikator pada instrument penilaian Indeks Kualitas Perencanaan. Untuk penentuan bobot instrument mengacu pada Surat Edaran Kementerian Perencanaan/Kepala Badan Perencanaan Nasional, dimana aspek Sinergi memiliki bobot 32, aspek Kualitas Perencanaan dengan bobot 58 dan aspek keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja memiliki bobot 10. Bobot penilaian setiap aspek ini terbagi pada setiap indicator dan subindikator.

Opsi jawaban instrument Indeks Kualitas Perencanaan adalah pilihan-pilihan jawaban yang disediakan dalam instrumen. Opsi ini memungkinkan evaluator dalam melakukan penilaian terhadap dokumen perencanaan kabupaten/kota. Opsi ini terdiri dari 4 kemungkinan jawaban yang akan dinilai oleh evaluator berdasarkan pertanyaan setiap aspek, indicator dan subindikator. Aspek Sinergi terdiri dari 43 pertanyaan, aspek Kualitas Perencanaan terdiri dari 10 pertanyaan dan aspek Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja terdiri dari 2 pertanyaan.

Penilaian setiap jawaban pertanyaan instrument Indeks Kualitas Perencanaan didasarkan pada hasil evaluasi setiap pertanyaan dengan 4 alternatif jawaban (item a, b, c dan d). Setiap alternatif jawaban memiliki skor nilai 1, 2, 3 dan 4 (mengikuti pernyataan negative dan positif pada setiap pertanyaan instrumen). Berdasarkan skor capaian dan bobot setiap aspek instrument Indeks Kualitas Perencanaan, maka aspek Sinergitas skor maksimum yang dapat dicapai adalah 128 dan skor minimum 32' aspek Kualitas Perencanaan skor maksimum yang dapat dicapai 248 dan skor minimum 62, sedangkan aspek Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja skor maksimumnya 24 dan skor minimum 6.

Secara ringkas jumlah komponen, subkomponen, bobot, pertanyaan dan skor yang mungkin dicapai instrument penilaian indeks kualitas perencanaan tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1 Jumlah Komponen, Subkomponen, Pertanyaan, Bobot dan Kemungkinan Skor Capaian Instrumen Indeks Kualitas Perencanaan

No	Komponen	ASPEK INDEKS KUALITAS PERENCANAAN			Jumlah
		Sinergitas	Kualitas Perencanaan	Keterhubungan	
1	Jumlah Indikator	3	2	1	6
2	Jumlah Subindikator	15	6	1	22
3	Jumlah Pertanyaan	43	10	2	55
4	Bobot Nilai	32	62	6	100
5	Skor Maksimum	128	248	24	400
6	Skor Minimum	32	62	6	100

D. Predikat Penilaian

Penilaian Indeks Kualitas Perencanaan kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Gorontalo dalam rentang nilai dari 100 – 400. Rentang nilai ini merupakan pengembangan dari rentang dilai dalam Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Predikat capaian kualitas perencanaan kabupaten/kota sebagai berikut:

Tabel 2 Rentang Nilai Instrumen Indeks Kualitas Perencanaan dan Capaian Predikat Perencanaan Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo

No	Rentang Nilai	Predikat
1.	361 - 400	Sangat Baik
2.	324 - 360	Baik
3.	384 - 323	Cukup Baik
4.	244 - 383	Kurang
5.	< 244	Sangat Kurang



E. Tahapan Pengukuran Indeks Kualitas Perencanaan

Mengacu pada Surat Edaran Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No.3 tahun 2023, tahapan pengukuran Indeks Kualitas Perencanaan Daerah kabupaten/kota Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

1. Sosialisasi

Untuk menyampaikan pentingnya penilaian Indeks Kualitas Perencanaan dan teknis penilaiannya, diadakan sosialisasi pada pemerintah kabupaten/kota yang dilakukan oleh tim evaluator yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur.

2. Penyampaian dokumen pemerintah kabupaten/kota.

Dokumen yang diperlukan adalah: (1) RPJMD; (2) RKPD; (3) Renstra OPD; dan (4) Renja OPD. Penyampaian dokumen ini dapat dilakukan secara langsung pada Tim Evaluator yang akan melakukan visitasi lapangan atau melalui surat elektronik. Bagi instansi yang tidak menyampaikan dokumen yang diperlukan, maka tidak dilakukan penilaian terhadap dokumen terkait sehingga hasil penilaiannya menyesuaikan dengan ketersediaan dokumen yang disampaikan.

3. Pengecekan Kelengkapan Dokumen

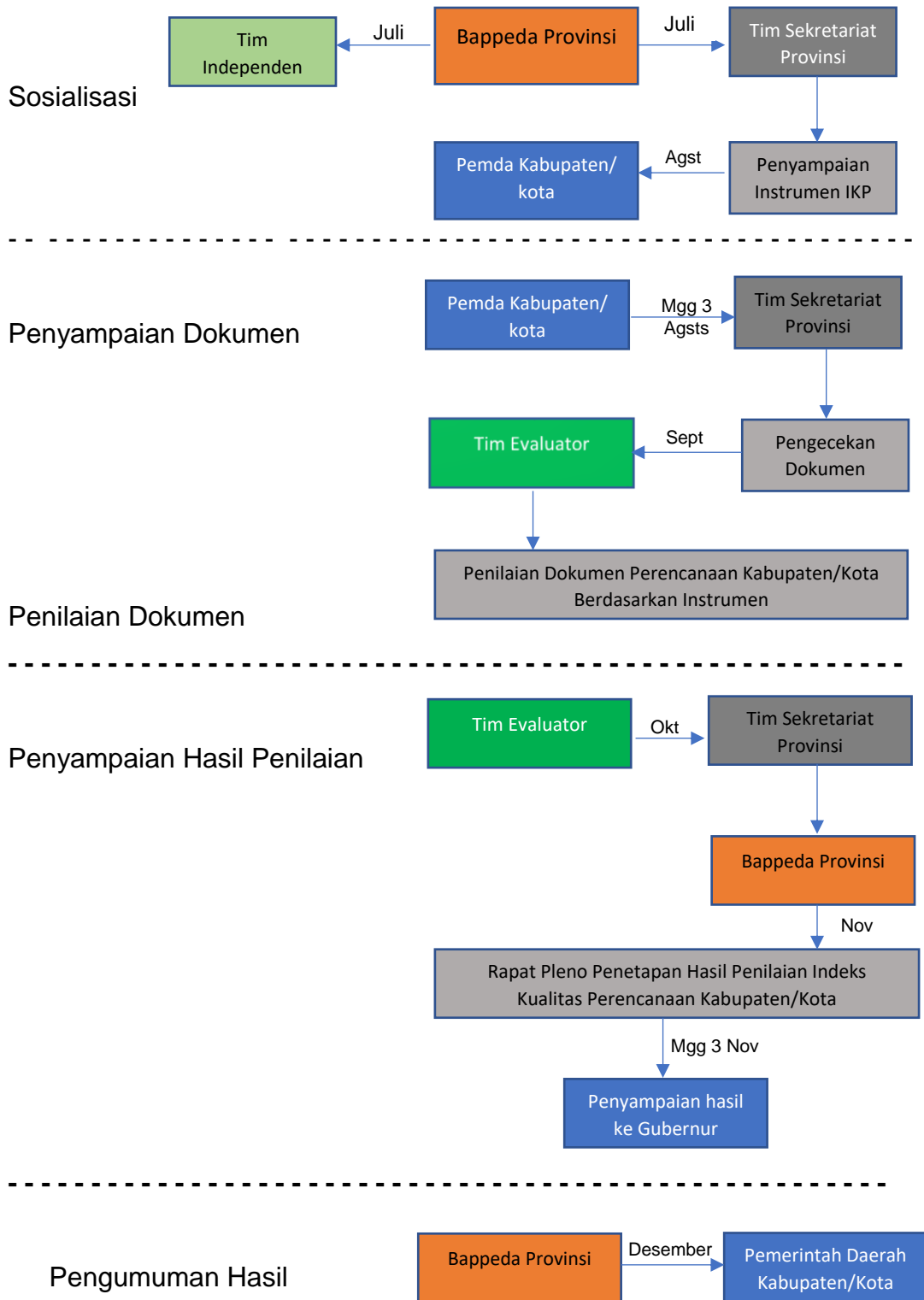
Sebelum dimulai penilaian, Bappeda Provinsi Gorontalo melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen yang sudah dikirimkan. Apabila terdapat kekurangan, maka akan dilakukan permohonan penyampaian kembali atas dokumen-dokumen terkait.

4. Penilaian Dokumen Perencanaan

Setelah periode pengumpulan dokumen terkait, mulai dilakukan penilaian atas dokumen perencanaan oleh Tim Evaluator Bappeda Provinsi Gorontalo berdasarkan instrument Indeks Kualitas Perencanaan

4. Penyampaian Hasil Penilaian

Setelah dokumen perencanaan selesai dilakukan penilaian, Bappeda Provinsi Gorontalo akan menyampaikan hasil penilaian tersebut kepada kabupaten/kota



Gambar 1 Tahapan Pengukuran Indeks Kualitas Perencanaan Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo

F. Tim Penilai

Tim penilai Indeks Kualitas Perencanaan Pemerintah kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Gorontalo dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur. Tim ini terdiri dari : Tim penilai independent yang berasal dari akademisi, tim penilai teknis yang merupakan tenaga fungsional perencana dan pejabat struktur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo, serta tim sekretariat yang merupakan staf Bappeda Provinsi Gorontalo.



G. Instrumen Penilaian

Secara rinci instrument Indikator kualitas perencanaan yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan di Provinsi Gorontalo tersaji pada Tabel 3.

Tabel 3. Instrumen Pengukuran Indeks Kualitas Perencanaan Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo

Aspek/Indikator/Subindikator/Pertanyaan				Opsi Jawaban	Bobot	Skor (1-4)	Nilai (B x S)
ASPEK SINERGI							
1	INDIKATOR 1 : Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten/Kota dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN				32		
	1)	Subindikator 1 : Keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RPJMN			2		
	a)	Tingkat Keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah RPJMD dengan PN RPJMN	A. Tidak ada keterkaitan sama sekali B. Terdapat keterkaitan tetapi tidak teridentifikasi proporsinya C. Kurang dari 50% sesuai dengan PN RPJMN D. Di atas atau sama dengan 50% sesuai dengan PN RPJMN		0.5		
	b)	Tersedianya tabel persandingan antara Sasaran Pembangunan daerah RPJMD dengan PN RPJMN	A. Tidak ada B. Tersedia tetapi tidak sesuai C. Tersedia tetapi belum lengkap D. Tersedia dan lengkap		0.5		
	c)		A. Tidak ada keterkaitan sama sekali		0.5		



Aspek/Indikator/Subindikator/Pertanyaan					Opsi Jawaban	Bobot	Skor (1-4)	Nilai (B x S)
				Tingkat Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD dengan PN RPJMN	B. Keselarasan Kurang dari 50% sesuai dengan PN RPJMN C. Keselarasan 50-75% sesuai dengan PN RPJMN D. Keselarasan di atas 75% sesuai dengan PN RPJMN			
			d)	Tersedianya tabel persandingan antara PN RPJMN dengan Prioritas Pembangunan Daerah	A. Tidak ada B. Tersedia tetapi tidak memiliki kesesuaian C. Tersedia dan memiliki kesesuaian di bawah 50% D. Tersedia dengan kesesuaian di atas 50%	0.5		
Jumlah Bobot Subindikato 1						2		
			2)	Subindikator 2 : Tersedianya dukungan program daerah dalam RPJMD kabupaten/kota untuk mendukung Kegiatan Prioritas dalam RPJMD Provinsi/RPJM		3		
			a)	Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 1 RPJMN: (Penguatan Ekonomi dan Pertumbuhan Berkualitas) sesuai kewenangan daerah	A. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD sama dengan atau kurang dari 25% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 1 RPJMN B. Ketersediaan dukungn program daerah dalam RPJMD lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 1 RPJMN C. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 1 RPJMN	0.43		



Aspek/Indikator/Subindikator/Pertanyaan					Opsi Jawaban	Bobot	Skor (1-4)	Nilai (B x S)
					D. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 75% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 1 RPJMN			
			b)	Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 2 RPJMN (Pengembangan dan Pemerataan Wilayah) sesuai kewenangan daerah	A. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD sama dengan atau kurang dari 25% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 2 RPJMN B. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 2 RPJMN C. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 2 RPJMN D. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 75% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 2 RPJMN	0.43		
			c)	Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 3 (Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas) sesuai kewenangan daerah	A. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD sama dengan atau kurang dari 25% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 3 RPJMN B. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 3 RPJMN	0.43		



Aspek/Indikator/Subindikator/Pertanyaan					Opsi Jawaban	Bobot	Skor (1-4)	Nilai (B x S)
					C. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 3 RPJMN D. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 75% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 3 RPJMN			
			d)	Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD kabupaten/kota untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 4 RPJMN (Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan) sesuai kewenangan daerah	A. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD sama dengan atau kurang dari 25% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 4 RPJMN B. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 4 RPJMN C. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 4 RPJMN D. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 75% dan sama terhadap kegiatan prioritas dalam PN 4 RPJMN	0.43		



Aspek/Indikator/Subindikator/Pertanyaan					Opsi Jawaban	Bobot	Skor (1-4)	Nilai (B x S)
				e)	Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD kabupaten/kota untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 5 RPJMN (Penguatan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar) sesuai kewenangan daerah	0.43		
				A. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD sama dengan atau kurang dari 25% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 5 RPJMN B. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 5 RPJMN C. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 5 RPJMN D. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 75% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 5 RPJMN				
				f)	Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD kabupaten/kota untuk mendukung kegiatan prioritas	0.43		



Aspek/Indikator/Subindikator/Pertanyaan					Opsi Jawaban	Bobot	Skor (1-4)	Nilai (B x S)
				dalam PN 6 RPJMN (Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim) sesuai kewenangan daerah	B. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 6 RPJMN C. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 6 RPJMN D. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 75% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 6 RPJMN			
			g)	Ketersediaan dukungan program daerah dalara RPJMD kabupaten/kota untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 7 RPJMN : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	A. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD sama dengan atau kurang dari 25% Dan Transformasi Pelayanan Publik sesuai kewenangan daerah terhadap kegiatan prioritas dalam PN 7 RPJMN B. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 7 RPJMN	0.42		



Aspek/Indikator/Subindikator/Pertanyaan					Opsi Jawaban	Bobot	Skor (1-4)	Nilai (B x S)
					C. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 7 RPJMN D. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 75% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 7 RPJMN			
Jumlah Bobot Subindikator 2						3		
		3)	Subindikator 3: Indikator makro pada RPJMD kabupaten/ kota selaras dengan indikator makro pada RPJMD Provinsi dan PJMN:			5		
			a)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	A. Menurun dari tahun sebelumnya B. Sama tapi tidak selaras C. Meningkat tapi tidak selaras D. Meningkat dan selaras	1		
			b)	Tingkat Kemiskinan (%)	A. Menurun dari tahun sebelumnya B. Sama tapi tidak selaras C. Meningkat tapi tidak selaras D. Meningkat dan selaras	1		
			c)	Pertumbuhan ekonomi (%)	A. Menurun dari tahun sebelumnya B. Sama tapi tidak selaras	1		



Aspek/Indikator/Subindikator/Pertanyaan					Opsi Jawaban	Bobot	Skor (1-4)	Nilai (B x S)
					C. Meningkat tapi tidak selaras D. Meningkat dan selaras			
			d)	Indeks Pembangunan Manusia (%)	A. Menurun dari tahun sebelumnya B. Sama tapi tidak selaras C. Meningkat tapi tidak selaras D. Meningkat dan selaras	1		
			f)	Gini Ratio (%)	A. Menurun dari tahun sebelumnya B. Sama tapi tidak selaras C. Meningkat tapi tidak selaras D. Meningkat dan selaras	1		
Jumlah Bobot Subindikator 3						5		
			4)	Dokumen RPJMD selaras dengan Proyek Prioritas Strategis	A. Kurang dari 25% selaras B. Antara 25 % sampai kurang 50% selaras C. Antara 50% sampai 75% selaras D. Di atas 75 % selaras	1		
			5)	Komponen SPM di RPJMD diselaraskan dengan komponen SPM Provinsi/Nasional	A. Kurang dari 25% selaras B. Antara 25 % sampai kurang 50% selaras C. Antara 50% sampai 75% selaras D. Di atas 75 % selaras	1		



Aspek/Indikator/Subindikator/Pertanyaan				Opsi Jawaban	Bobot	Skor (1-4)	Nilai (B x S)
			6)	Target SPM daerah diselaraskan dengan target SPM nasional	A. Kurang dari 25% selaras B. Antara 25 % sampai kurang 50% selaras C. Antara 50% sampai 75% selaras D. Di atas 75 % selaras	1	
Jumlah Bobot Subindikator 4, 5 dan 6					3		
		b.	INDIKATOR 2 :Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP		13		
			1)	Subindikator 1: Keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD kabupaten/kota dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP	2.50		
			a)	Tingkat Keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah RKPD dengan PN RKP	A. Di bawah 25 % keterkaitan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan Sasaran PN RKP B. 25 % sampai dengan dibawah 50% keterkaitan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan Sasaran PN RKP C. 50% sampai dengan dibawah 75% keterkaitan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan Sasaran PN RKP D. Di atas 75% keterkaitan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan Sasaran PN RKP	0.625	
			b)	Tersedianya tabel persandingan antara Sasaran Pembangunan	A. Tidak tersedia B. Tersedia tapi tidak sesuai C. Tersedia tetapi tidak lengkap	0.625	



Aspek/Indikator/Subindikator/Pertanyaan					Opsi Jawaban	Bobot	Skor (1-4)	Nilai (B x S)
				daerah RKPD kabupaten/kota dengan PN RKP	D. Tersedia, sesuai dan lengkap			
			c)	Tingkat Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD kabupaten/ kota dengan PN RKP	A. Kurang dari 25 % prioritas program RKPD selaras dengan PN RKP B. 25 % sampai dengan kurang dari 50% prioritas program RKPD selaras dengan PN RKP C. 50 % sampai dengan kurang dari 70% prioritas program RKPD selaras dengan PN RKP D. Di atas 75% prioritas program RKPD selaras dengan PN RKP	0.625		
			d)	Tersedianya tabel persandingan antara PN RKP dengan Prioritas Pembangunan Daerah kabupaten/kota	A. Tidak tersedia B. Tersedia tapi tidak sesuai C. Tersedia tetapi tidak lengkap D. Tersedia, sesuai dan lengkap	0.625		
Jumlah Bobot Subindikator 1						2.5		
		2)	Subindikator 2: Tersedianya dukungan program daerah RKPD kabupaten/ kota terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 1: Penguatan Ekonomi dan Pertumbuhan Berkualitas RKP			1.50		
			a)		A. Tingkat dukungan Kurang dari 25%	0.75		



Aspek/Indikator/Subindikator/Pertanyaan					Opsi Jawaban	Bobot	Skor (1-4)	Nilai (B x S)
				Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Penguatan Ekonomi dan Pertumbuhan Berkualitas RKP sesuai dengan kewenangan daerah	B. Tingkat dukungan 25% sampai dengan kurang dari 50% C. Tingkat dukungan 50% sampai dengan kurang dari 75% D. Tingkat dukungan 75 % atau lebih			
			b)	Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas /kegiatan prioritas RKP dengan program daerah	A. Tidak tersedia B. Tersedia tapi tidak sesuai C. Tersedia tetapi tidak lengkap D. Tersedia, sesuai dan lengkap	0.75		
Jumlah Bobot Subindikator 2						1.5		
			3)	Subindikator 3: Tersedianya dukungan program daerah RKP kabupaten/ kota terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 2: Pengembangan dan Pemerataan Wilayah RKP		1.50		
			a)	Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Pengembangan dan Pemerataan Wilayah RKP sesuai dengan kewenangan daerah	A. Tingkat dukungan Kurang dari 25% B. Tingkat dukungan 25% sampai dengan kurang dari 50% C. Tingkat dukungan 50% sampai dengan kurang dari 75% D. Tingkat dukungan 75 % atau lebih	0.75		



Aspek/Indikator/Subindikator/Pertanyaan					Opsi Jawaban	Bobot	Skor (1-4)	Nilai (B x S)
			b)	Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas /kegiatan prioritas RKP dengan program daerah	A. Tidak tersedia B. Tersedia tapi tidak sesuai C. Tersedia tetapi tidak lengkap D. Tersedia, sesuai dan lengkap	0.75		
Jumlah Bobot Subindikator 3						1.5		
			4)	Subindikator 4: Tersedianya dukungan program daerah RKPD kabupaten/ kota terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 3: Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing RKP		1.50		
			a)	Tingkat dukungan program daerah kabupaten/ kota terhadap kegiatan prioritas pada PN Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing RKP sesuai dengan kewenangan daerah	A. Tingkat dukungan Kurang dari 25% B. Tingkat dukungan 25% sampai dengan kurang dari 50% C. Tingkat dukungan 50% sampai dengan kurang dari 75% D. Tingkat dukungan 75 % atau lebih	0.75		
			b)		A. Tidak tersedia	0.75		



Aspek/Indikator/Subindikator/Pertanyaan					Opsi Jawaban	Bobot	Skor (1-4)	Nilai (B x S)
				Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas / kegiatan prioritas RKP dengan program daerah kabupaten/ kota	B. Tersedia tapi tidak sesuai C. Tersedia tetapi tidak lengkap B. Tersedia, sesuai dan lengkap			
Jumlah Bobot Subindikator 4						1.5		
			5)	Subindikator 5: Tersedianya dukungan program daerah RKPD kabupaten/ kota terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan RKP		1.50		
			a)	Tingkat dukungn program daerah kabupaten/ kota terhadap kegiatan prioritas pada PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan RKP sesuai dengan kewenangan daerah	A. Tingkat dukungan Kurang dari 25% B. Tingkat dukungan 25% sampai dengan kurang dari 50% C. Tingkat dukungan 50% sampai dengan kurang dari 75% D. Tingkat dukungan 75 % atau lebih	0.75		
			b)	Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah kabupaten/ kota	A. Tidak tersedia B. Tersedia tapi tidak sesuai C. Tersedia tetapi tidak lengkap D. Tersedia, sesuai dan lengkap	0.75		



Aspek/Indikator/Subindikator/Pertanyaan					Opsi Jawaban	Bobot	Skor (1-4)	Nilai (B x S)
Jumlah Bobot Subindikator 5						1.5		
			6)	Subindikator 6: Tersedianya dukungan program daerah RKPD kabupaten/ kota terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 5 : Penguatan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar RKP		1.50		
			a)	Tingkat dukungan program daerah kabupaten/ kota terhadap kegiatan prioritas pada PN Penguatan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar RKP sesuai dengan kewenangan daerah	A. Tingkat dukungan Kurang dari 25% B. Tingkat dukungan 25% sampai dengan kurang dari 50% C. Tingkat dukungan 50% sampai dengan kurang dari 75% D. Tingkat dukungan 75 % atau lebih	0.75		
			b)	Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas /kegiatan prioritas RKP dengan program daerah kabupaten/ kota	A. Tidak tersedia B. Tersedia tapi tidak sesuai C. Tersedia tetapi tidak lengkap D. Tersedia, sesuai dan lengkap	0.75		
Jumlah Bobot Subindikator						1.5		



Aspek/Indikator/Subindikator/Pertanyaan				Opsi Jawaban	Bobot	Skor (1-4)	Nilai (B x S)
			7)	Subindikator 7: Tersedianya dukungan program daerah RKP kabupaten/ kota terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 6: Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim RKP		1.50	
			a)	Tingkat dukungan program daerah kabupaten/ kota terhadap kegiatan prioritas pada PN Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim RKP sesuai dengan kewenangan daerah	A. Tingkat dukungan Kurang dari 25% B. Tingkat dukungan 25% sampai dengan kurang dari 50% C. Tingkat dukungan 50% sampai dengan kurang dari 75% D. Tingkat dukungan 75 % atau lebih	0.75	
			b)	Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah kabupaten/ kota	A. Tidak tersedia B. Tersedia tapi tidak sesuai C. Tersedia tetapi tidak lengkap D. Tersedia, sesuai dan lengkap	0.75	
Jumlah Bobot Subindikator 7						1.5	
			8)	Subindikator 8: Indikator makro pada RKP kabupaten/ kota selaras dengan indikator makro pada RKP Provinsi/ RKP		1.50	
			a)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	A. Menurun dan tidak selaras B. Meningkat tapi tidak selaras	0.75	



Aspek/Indikator/Subindikator/Pertanyaan					Opsi Jawaban	Bobot	Skor (1-4)	Nilai (B x S)
					C. Meningkatkan dan selaras D. Meningkatkan melampaui target dan selaras			
			b)	Tingkat Kemiskinan (%)	A. Menurun dan tidak selaras B. Meningkatkan tapi tidak selaras C. Meningkatkan dan selaras D. Meningkatkan melampaui target dan selaras	0.75		
Jumlah Bobot Subindikator 8						1.5		
			C	INDIKATOR 3: Kesesuaian Anggaran Daerah (APBD) kabupaten/ kota untuk Membiayai Program Prioritas Nasional / Major Project dalam dokumen RKPD		10		
			1)	Tersedianya Program dukungan Prioritas APBD Dokumen Nasional/ Major RKPD	A. Tidak Tersedia B. Tersedia tapi tidak sesuai C. Tersedia tapi dan sesuai tapi tidak lengkap D. Tersedia, sesuai dengan lengkap	10		
Jumlah Bobot Indikator 3						10		
ASPEK KUALITAS PERENCANAAN						62		
			a)	INDIKATOR 1. Kesesuaian antara Isu Strategis - Target - Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD atau RKPD kabupaten/ kota		49		
			1)	Subindikator 1: Kesesuaian Kebutuhan Isu Strategis dengan Kebutuhan Daerah		18		
			a)		A. Penyusunan kebutuhan daerah san1a dengan atau kurang dari 25% hasil evaluasi	6		



Aspek/Indikator/Subindikator/Pertanyaan					Opsi Jawaban	Bobot	Skor (1-4)	Nilai (B x S)
					Keterkaitan Permasalahan daerah (kebutuhan daerah) dengan hasil evaluasi B. Penyusunan kebutuhan daerah lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% hasil evaluasi C. Penyusunan kebutuhan daerah lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% hasil evaluasi D. Penyusunan kebutuhan daerah lebih dari 75% hasil evaluasi			
				b)	Keterkaitan prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan pembangunan A. Kesesuaian sama dengan atau kurang dari 25% B. Kesesuaian lebih dari 25% dan sarna dengan atau kurang dari 50% C. Kesesuaian lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% D. Kesesuaian lebih dari 75 %	6		
				c)	Penyusunan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota berdasarkan isu strategis A. Penyusunan prioritas kurang dari 25% isu strategis yang telah diidentifikasi B. Penyusunan prioritas sama dengan 25% sampai dengan kurang dari 50% isu strategis yang telah diidentifikasi	6		



Aspek/Indikator/Subindikator/Pertanyaan						Opsii Jawaban	Bobot	Skor (1-4)	Nilai (B x S)
						C. Penyusunan prioritas sama dengan 50% sampai dengan kurang dari 75% isu strategis yang telah diidentifikasi D. Penyusunan prioritas sama dengan 75% atau lebih isu strategis yang telah diidentifikasi			
Jumlah Bobot Subindikator 1							18		
				2)	Subindikator 2: Kesesuaian Target dan Sasaran Pembangunan dalam menyelesaikan Isu dan Prioritas Daerah		14		
				a)	Tersedianya indikator sasaran untuk isu strategis/ prioritas pembangunan daerah	A. Tidak Ada B. Tersedia tetapi kurang rasional dan tidak konsisten C. Tersedia, rasional tetapi tidak konsisten D. Tersedia, rasional dan konsisten	6.00		
				b)	Tingkat kesesuaian indikator sasaran prioritas pembangunan daerah dalam menyelesaikan isu strategis daerah/prioritas pembangunan daerah	A. Kurang dari 25 sesuai B. 25% sampai dengan kurang dari 50% dijabarkan C. 50% sampai dengan kurang dari 75% dijabarkan D. Keterkaitan 75 % atau lebih dijabarkan	8.00		
Jumlah Bobot Subindikator 2							14.00		
				3)	Subindikator 3: Kesesuaian Program/ Kegiatan/ Proyek dalam mencapai target dan sasaran program		17		
				a)		A. Kurang dari 25 dijabarkan	8.50		



Aspek/Indikator/Subindikator/Pertanyaan					Opsi Jawaban	Bobot	Skor (1-4)	Nilai (B x S)
					Prioritas Pembangunan Daerah kabupaten/ kota dijabarkan menjadi program prioritas	B. 25% sampai dengan kurang dari 50% dijabarkan C. 50% sampai dengan kurang dari 75% dijabarkan D. Keterkaitan 75 % atau lebih dijabarkan		
			b)	Tingkat Keterkaitan indikator sasaran prioritas pembangunan daerah kabupaten/ kota dengan indikator kinerja program prioritas	A. Keterkaitan kurang dari 25 % B. Keterkaitan antara 25% sampai dengan kurang dari 50% C. Keterkaitan antara 50% sampai dengan kurang dari 75% D. Keterkaitan 75 % atau lebih	8.50		
Jumlah Bobot Subindikator 3						17.00		
			4)	Subindikator 4: Inovasi Perencanaan Pembangunan		9		
			1)	Keterkaitan Permasalahan dengan Inovasi yang dilaksanakan	A. Tidak ada inovasi B. Memiliki inovasi tetapi keterkaitannya lemah C. Memiliki inovasi dengan keterkaitan yang cukup kuat D. Memiliki inovasi dan keterkaitannya kuat	3		
			2)	Keterkaitan output dengan outcome inovasi	A. Output kurang tercapai dan outcome inovasi tidak ada	3		



Aspek/Indikator/Subindikator/Pertanyaan						Opsi Jawaban	Bobot	Skor (1-4)	Nilai (B x S)
						B. Output tercapai dan keterkaitan outcome inovasi lemah C. Output tercapai dan keterkaitan outcome inovasi cukup kuat D. Output tercapai dan keterkaitan outcome inovasi kuat			
				3)	Proporsi jumlah proyek inovasi di dalam perencanaan pembangunan daerah kabupaten/ kota terhadap perencanaan proyek regulasi	A. 0% B. 0,1%- 2% C. 2% - 4,9% D. => 5%	3		
Jumlah Bobot Subindikator 4							9		
ASPEK : KETERHUBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DENGAN PERENCANAAN KINERJA							6		
			a)	INDIKATOR 1:Target dan Sasaran Pembangunan daerah menjadi Target dan Sasaran Kinerja Lembaga terkait					
			1)	Subindikator 1: <i>Cascading</i> Target Pembangunan Daerah kabupaten/ kota menjadi Target Kinerja Lembaga Terkait di dalam Pemerintah Daerah			6		
			a)	Tersedianya penanggungjawab OPD kabupaten/ kota untuk masing-masing program prioritas	A. Tidak tersedia B. Tersedia sebagian C. Tersedia seluruhnya tetapi tidak sesuai tupoksi D. Tersedianya seluruhnya dan sesuai tupoksi		3		



Aspek/Indikator/Subindikator/Pertanyaan						Opsi Jawaban	Bobot	Skor (1-4)	Nilai (B x S)
				b)	Target dan sasaran prioritas daerah menjadi IKU OPD kabupaten/ kota yang bertanggungjawab	A. Tidak Ada B. Ada sebagian dan bertanggung jawab C. Tersedia seluruhnya dan sebagian bertanggungjawab D. Tersedia seluruhnya dan bertanggung jawab	3		
Jumlah Indikator/Subindikator 1							6		
							100.00		

Sumber: Dikembangkan dari Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bapenas, No. 3 tahun 2023



H. INDIKATOR TAMBAHAN

Selain indikator utama yang diuraikan pada Tabel 3 di atas terdapat juga 4 (empat) indikator tambahan dalam penilaian Indeks Kualitas Perencanaan. Indikator tersebut adalah GEDSI, SPM, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tata Kelola Data untuk perencanaan.

1) GEDSI

GEDSI adalah singkatan dari *Gender Equality Disability Social Inclusion*. Kualitas perencanaan dapat dilihat dari integrasi antara program pemerintah daerah dengan kesetaraan gender, ramah disabilitas dan kesetaraan sosial. Subindikator meliputi:

- a) Keterlibatan Partisipatif : Tingkat partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program pembangunan
- b) Anggaran Responsif Gedsu : Prosentase anggaran yang dialokasikan untuk program yang mendukung kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial;
- c) Peningkatan Kapasitas bagi Pemangku Kepentingan: Jumlah pelatihan dan penguatan kapasitas bagi aparatur pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan prinsip-prinsip GEDSI

2) Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Dalam mengevaluasi kualitas perencanaan daerah indikator tambahan yang digunakan adalah dengan melihat SPM. Indikator ini memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan yang layak dan berkualitas, terutama pada sector kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sosial. Subindikator meliputi:

- a) Jenis Layanan: ketersediaan SPM sektor pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan, perlindungan sosial, dan ketenteraman serta ketertiban umum.
- b) Target Kinerja: Target jumlah tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, cakupan layanan pendidikan, dan aksesibilitas air bersih.



- c) Tanggung Jawab Pemerintah Daerah: Ketersediaan layanan yang memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan, termasuk alokasi sumber daya yang memadai dan pelaporan kinerja secara berkala serta kesesuaian pelayanan dengan kebutuhan masyarakat.

3) Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu indikator tambahan dalam mengevaluasi kualitas perencanaan daerah. Hal ini disebabkan pengelolaan keuangan merupakan salah satu faktor penentu dalam pelaksanaan program secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Subindikator meliputi:

- a) Optimalisasi Penggunaan Anggaran: alokasi anggaran pemerintah daerah dilakukan secara tepat dan sesuai dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah (RPJMD).
- b) Pengendalian dan Akuntabilitas: transparansi dan akuntabel pengelolaan keuangan yaitu kesesuaian anggaran yang dikeluarkan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan
- c) Peningkatan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Kemampuan Pengelolaan keuangan daerah dalam mendorong peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pembangunan yang lebih cepat.

4) Tata Kelola Data

Tata Kelola data merupakan indikator tambahan yang digunakan untuk menilai mengukur kualitas perencanaan. Tata kelola data bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam perencanaan adalah akurat, dapat diandalkan, dan tersedia tepat waktu, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan data tersebut dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien. Subindikator adalah:



- a) Kualitas data: Tata kelola data berfokus pada memastikan kualitas data yang digunakan dalam perencanaan, termasuk akurasi, kelengkapan, konsistensi, dan validitas data.
- b) Integrasi Pengelolaan Data: Data dari berbagai sumber dan sektor dikelola secara terintegrasi, sehingga memungkinkan analisis yang komprehensif dan mendalam dalam proses perencanaan.
- c) Aksesibilitas dan Keamanan Data: Data dapat diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan dalam proses perencanaan, namun juga memastikan bahwa data tersebut dilindungi dari penyalahgunaan atau akses yang tidak sah.
- d) Data Berbasis Bukti: Tata kelola data mendukung perencanaan yang didasarkan pada bukti atau data konkret, bukan pada asumsi atau perkiraan yang tidak teruji.
- e) Penggunaan Teknologi Informasi: Penggunaan teknologi informasi dan sistem digital dalam pengumpulan, analisis, dan distribusi data secara efisien.

I. PENUTUP

Panduan ini pengukuran Indeks Kualitas Perencanaan dimaksud untuk memberikan satu pemahaman tentang penilaian kualitas perencanaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Melalui panduan ini evaluator dan staf pemerintah kabupaten/kota Referens yang terkait dengan perencanaan memiliki persepsi yang sama dari setiap aspek perencanaan yang dinilai, sehingga memperkecil subyektivitas dalam penilaian.

Sumber referens utama dalam penyusunan panduan ini adalah Surat Edaran No.3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan yang dikeluarkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

